

Belajar Inovasi Pribumi Versi China

Firoz Gaffar,

Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI)

Apa hasil Dialog Strategis dan Ekonomi Amerika Serikat (AS)-China akhir Mei 2010 lalu? Tidak ada terobosan. China resisten atas rezim kurs yuan yang dijangkarkan ke dolar AS, yaitu CNY 6,8296 per dolar. Sebaliknya, China malah menantang AS dengan menjadikan kemampuan teknologi sebagai fokus pembangunan ekonominya. Ini menampar AS yang justru mengandalkan ekspor berbasis teknologi.

Percekcokan soal teknologi ini dibangkitkan China yang pada Desember 2009 menggagas *Draft Notice Launching the National Indigenous Innovation Product (NIIP) Accreditation Work for 2010*. Sebelumnya, pada November 2009 sudah terbit *Circular* Nomor 618 dan *2009 Measures*. Kebijakan inovasi pribumi ini mempersyaratkan pengadaan barang pemerintah harus menggunakan produk dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikembangkan, dimiliki, dan didaftarkan di China. Sektor yang terkena adalah komputer, peranti lunak, telekomunikasi, dan teknologi ramah lingkungan (*green technology*). Mengapa hal ini kontroversial?

Sudah umum diketahui, China menghadapi tiga tantangan strategis di abad ini, yaitu kelebihan penduduk, keterbatasan sumberdaya, dan kesenjangan HKI. Ini yang mendorong lahirnya ide inovasi pribumi melalui WTO (*open-door-policy*) made in China dengan *advanced manufacturing base* (AMB), dan transisi dari A&D (*acquisition & development*) menuju ke R&D (*research & development*) yang dilandasi pertumbuhan ekonomi.

Restriksi akses

China menganggap strategi inovasi secara tradisional, adalah peniruan (*imitation*) yang punya banyak kendala. Inovasi pribumilah jalan terbaik memperbaiki kemampuan bersaing secara internasional dan meraih nilai industri yang tinggi buat korporasi China. Prof. Chen Jin (2010) dari Zhejiang University mengartikan: "*Indigenous innovation is a process to explore potential market with through in-house R&D activities and external knowledge acquisition.*"

Metode mencapainya dengan membawa masuk sistem (dari negara, industri, atau perusahaan) yang menguasai teknologi dan produk unggulan. Dengan terobosan teknologi, kepemimpinan pasar, dan integrasi HKI akan terbangun teknologi sistematis yang memiliki kemampuan kuat untuk mengelola diri dan bereaksi atas gejolak pasar.

Tapi, dalam perspektif ekonomi mewujudkan inovasi pribumi tidaklah mu-

dah. David Wolf (2010) mensyaratkan sembilan tantangan yang mesti dijawab. (1) Pemerintah atau korporasi yang menjadi motornya? (2) Bagaimana peran universitas, pemerintah, korporasi dalam riset? (3) Apakah "imitasi pribumi" ini tahapan saja atau akan terus-menerus? (4) Apakah bank akan mengalokasikan dana untuk mendukung riset? (5) Sejauh mana inovator China digerakkan pihak luar, atau makin jauh dari inovasi dengan longgarnya proteksi HKI? (6) Bagaimana fokus pada keberuan daripada hanya penemuan-kembali secara sederhana? (7) Di mana kaitan prioritas nasional, tantangan global, kemampuan lokal, dan peluang bisnis yang menjadi target? (8) Ke mana negara lain bergerak, setelah sejak dekade lalu perusahaan Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa memangkas biaya R&D-nya? (9) Sejauh mana inovasi ini meliputi substitusi impor?

Kalau sembilan soal di atas tidak terjawab meyakinkan, jelas China membuat restriksi pasar yang bertolak belakang dengan semangat perdagangan bebas. Dalam bahasa Robert Holleyman (2010), CEO BSA, beleid seperti ini tidak

ha-

untungkan, dan mendorong kebijakan non-diskriminatif, *merit-based*, dan pengadaan barang yang transparan.

National treatment

Dalam perspektif hukum, HKI sudah diakui dan dilindungi di China mulai tahun 1979 dengan diberlakukannya *beragam Undang-Undang tentang HKI*. Tahun 1980, China masuk World Intellectual Property Organization (WIPO). China pun mengikatkan diri dengan Konvensi Berne (hak cipta), Konvensi Paris (hak kekayaan industrial), dan Persetujuan Madrid (merek). Bahkan pada 1992, China pernah menandatangani MoU dengan pihak Amerika Serikat.

Terkait dengan Persetujuan TRIPs sebagai lampiran Persetujuan WTO yang berlaku bagi semua negara anggota WTO (tidak terkecuali China), prinsip "perlakuan nasional" (*national treatment*) tampaknya dilanggar China. Prinsip non-diskriminatif ini mensyaratkan setiap negara anggota untuk memperlakukan warganegara lain di negaranya sama baik (*no less favourable*) seperti memperlakukan warganegara sendiri, terkait dengan perlindungan HKI. Kalau dalam proses pengadaan barang ada kewajiban terkait HKI yang lebih menguntungkan warganegara China, maka jelas di sini terjadi pelanggaran hukum.

Patut dicatat, penegakan HKI di China tidaklah mudah. Contohnya, sosialisasi pendidikan yang adekuat belum berjalan, sehingga hanya ada sedikit kesadaran bahwa pelanggaran HKI adalah kriminal. Contoh lain, banyak pelaku pelanggaran mempunyai kedekatan pribadi dengan pejabat daerah atau penegak hukum, sehingga mereka mendapatkan payung untuk menutupi kejahatan HKI-nya.

China bisa saja menambah daftar pembelaan diri dengan mengatakan, karakter budaya dan tingkat ekonomi belum siap. Bisa juga berkelit menunjuk *civil law system* yang dianut China sulit beradaptasi dengan sistem hukum HKI yang didominasi negara penganut *common law system*, menurut Haskins (2006).

Namun, dalam hukum internasional terdapat asas resiprositas, yang bila China melakukan kebijakan yang memberatkan negara lain, maka negara lain juga bisa membalasnya. Padahal, HKI adalah keniscayaan. Yang tinggal hanya perseteruan. Berlanjut terus kebencian Amerika Serikat atas China, dengan menaruh ke dalam *priority watch list*, menjatuhkan sanksi dagang, atau memperpanjang sengketa.

China pun tidak akan tinggal diam, berbagai korporasi AS di China dibuat tidak nyaman, sehingga Google pun angkat kaki dari sana. Tidaklah dunia seperti ini yang kita inginkan.



nya meru- gikan bis- nis Amerika, tapi malah menghalangi akses China atas teknologi inovatif yang berkelas dunia. Ini pada dasarnya menghancurkan pertumbuhan ekonomi China sendiri.

Protes pun marak. Pada 26 Januari 2010 lalu, 19 pimpinan asosiasi bisnis berbasis teknologi di AS mengirim surat ke para petinggi AS agar memprioritaskan isu persaingan tidak sehat ini dalam berbagai forum bilateral dan multilateral. Langkah ini diikuti ribuan korporasi AS yang diwakili 23 perkumpulan industri yang pada 10 Mei 2010 meminta pemerintahnya mendesak China membatalkan kebijakan ini.

China mesti membuka lebar pasar buat investasi asing, memberi insentif terhadap inovasi yang berbasis HKI, mendorong kompetisi sehat agar konsumen di-